



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**KEMANTREN GANDOMANAN**

ꦏꦶꦲꦏꦺꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦒꦺꦩꦺꦤꦤꦺꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦏꦺꦴꦗꦺꦴꦏꦺꦴꦫꦠ

Jl. Ibu Ruswo No 3 A Yogyakarta Kode Pos: 55121 Telp. (0274) 376783 Fax (0274) 376783  
EMAIL : [gm@jogjakota.go.id](mailto:gm@jogjakota.go.id) HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA  
GANDOMANAN KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 064 /KPTS/GM/V/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PADA  
KEMANTREN GANDOMANAN KOTA YOGYAKARTA  
MANTRI PAMONG PRAJA GANDOMANAN KOTA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian, kesamaan, keseimbangan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, sehingga setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan Publik;
  - b. Bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mempunyai acuan dalam penilaian, pengukuran kinerja dan kualitas pelayanan;
  - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Gondomanan Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
  - 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  - 7 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
  - 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

- 9 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 10 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- 11 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 12 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja;
- 13 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- 14 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik;
- 15 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kemantren Dan Kelurahan;
- 16 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Pemerintah Yogyakarta.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GANDOMANAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN STÁNDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PADA KEMANTREN GANDOMANAN KOTA YOGYAKARTA**

- PERTAMA** : Standar Pelayanan Publik (SPP) Penyelenggaraan Perizinan dan Pelayanan pada Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik pada Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. Pelayanan Pendampingan Permohonan dan Pencetakan Dokumen Kependudukan;
  2. Pelayanan Pendampingan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) melalui Online Single Submission (OSS);
  3. Pelayanan Pernyataan Beda Nama;
  4. Pelayanan Pernyataan Domisili Usaha;
  5. Pelayanan Pernyataan Tempat Tinggal;
  6. Pelayanan Keterangan Domisili Kantor Tetap Kepengurusan Partai Politik;
  7. Pelayanan Pernyataan Ahli Waris;
  8. Pelayanan Pernyataan Penghasilan Orang Tua;
  9. Pelayanan Dispensasi Nikah;
  10. Pelayanan Pernyataan Belum Memiliki Rumah;
  11. Pelayanan Legalisasi;
  12. Pelayanan Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atau Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4);
  13. Pelayanan Pernyataan Anak Tidak/ Belum Menikah dan Belum Bekerja.

#### 14. Pelayanan Rekomendasi Persetujuan Pondokan

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara perizinan, aparat pengawasan, dan masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 31 Mei 2024

Menteri Pamong Praja Gondomanan



CAHYA WIJAYANTA, S.Sos.  
NIP. 19701119 199603 1 003



**SEGORO AMARTO**  
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYOKARTO  
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN- KEBERSAMAAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG  
PRAJA GONDONANAN  
NOMOR : 064/KPTS/GM/V/2024  
TANGGAL : 31 Mei 2024  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
(SPP)

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PADA  
KEMANTREN GONDONANAN KOTA YOGYAKARTA**

<b>NO</b>	<b>NAMA SPP</b>
1	Pelayanan Pendampingan Permohonan dan Pencetakan Dokumen Kependudukan
2	Pelayanan Pendampingan Pendaftaran Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Perseorangan melalui Online Single Submission (OSS).
3	Pelayanan Registrasi Pernyataan Beda Nama
4	Pelayanan Registrasi Pernyataan Domisili Usaha
5	Pelayanan Registrasi Pernyataan Tempat Tinggal
6	Pelayanan Keterangan Domisili Kantor Tetap Kepengurusan Partai Politik
7	Pelayanan Registrasi Pernyataan Ahli Waris
8	Pelayanan Registrasi Pernyataan Penghasilan Orang Tua
9	Pelayanan Dispensasi Nikah
10	Pelayanan Registrasi Pernyataan Belum Memiliki Rumah
11	Pelayanan Legalisasi
12	Pelayanan Registrasi Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga atau Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4)
13	Pelayanan Registrasi Pernyataan Anak Tidak/Belum Menikah dan Belum Bekerja
14	Pelayanan Rekomendasi Persetujuan Pondokan

Ditetapkan di : Yogyakarta,  
Pada Tanggal : 31 Mei 2024  
Mantri Pamong Praja Gondomanan



CAHYA WIJAYANTA, S.Sos.  
NIP. 19701119 199603 1 003